

Sensitivitas Gender Dalam Petunjuk Teknis Penanganan Perempuan Korban Perkosaan Di Pusinafis Bareskrim Polri

Zikriana Novitia
Universitas Indonesia
zikriananovitia@gmail.com

Abstract

This research studies the gender sensitivity in technical guidance to assist women who become rape victim in the field of criminal identification. This study uses descriptive qualitative methods such as interview and document research. Result from this study concludes that technical guidance to assist rape victim in criminal identification still disparages gender sensitivity.

Keywords: *Gender sensitivity, technical guidance, women, rape, criminal identification.*

Abstrak

Penelitian ini mempelajari sensitivitas gender dalam bimbingan teknis untuk membantu perempuan yang menjadi korban pemerkosaan di bidang identifikasi kriminal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif seperti wawancara dan penelitian dokumen. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa bimbingan teknis untuk membantu korban perkosaan dalam identifikasi kriminal masih meremehkan sensitivitas gender.

Kata kunci: Sensitivitas gender, bimbingan teknis, wanita, pemerkosaan, identifikasi pidana.

Pendahuluan

Kekerasan terhadap perempuan semakin hari semakin bertambah kuantitasnya. Hal ini kemudian ditunjukkan oleh temuan-temuan data, baik secara global maupun nasional. Seperti yang dipaparkan pada *National Intimate Partner and Sexual Violence Survey: 2010 Summary Report*, bahwa lebih dari 53 juta perempuan di Amerika mengalami kekerasan seksual. Satu dari 5 perempuan di Amerika Serikat mengalami perkosaan, jika diartikan hampir 22 juta perempuan di Amerika Serikat mengalami perkosaan. Selain itu, lebih dari 32 juta perempuan di Amerika Serikat mengalami kontak seksual yang tidak diinginkan.

Kemudian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK juga membuat laporan tahunan

tentang kekerasan terhadap perempuan. LBH APIK adalah lembaga yang bertujuan agar terwujudnya hukum yang berperspektif perempuan. Menurut data LBH APIK, pada tahun 2009 jumlah kekerasan terhadap perempuan adalah 1.002 kasus. Kemudian pada tahun 2010 menurun menjadi 925 kasus dan pada tahun 2011 sebanyak 706 kasus. Selain itu, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) juga menunjukkan data - data terkait kasus kekerasan terhadap perempuan.

Data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan bahwa pada tahun 2009 telah terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 143.586 kasus. Kekerasan terhadap perempuan di ranah

domestik sebanyak 136.849 kasus, di ranah publik sebanyak 6.683 kasus dan di ranah negara sebanyak 54 kasus. Selanjutnya pada tahun 2010 telah terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 105.103 kasus. Kekerasan terhadap perempuan di ranah domestik sebanyak 101.128 kasus, di ranah publik sebanyak 3.530 kasus dan di ranah negara sebanyak 445 kasus. Kemudian pada tahun 2011 tercatat ada 119.107 kasus kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan di ranah domestik 113.878 kasus, di ranah publik sebanyak 5.187 kasus dan di ranah negara sebanyak 42 kasus.

Selanjutnya dipaparkan pula dalam catatan tahunan yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan bahwa kekerasan seksual adalah kasus yang paling banyak terjadi. Pada tahun 2010 tercatat 2.645 kasus kekerasan seksual dan jumlahnya meningkat pada tahun 2011 yakni sebanyak 4.335 kasus. Dalam catatan tahunan tersebut dijelaskan bahwa data kekerasan, khususnya kekerasan seksual, sebenarnya jauh lebih banyak daripada yang tercatat. Tidak tercatatnya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan disebabkan karena keengganan para korban untuk melaporkan kasusnya dikarenakan rasa malu, trauma, serta tidak mendapat dukungan dari orang-orang terdekatnya.

Mustofa (2007) mengemukakan dalam viktimologi, suatu ilmu pengetahuan ilmiah yang mempelajari kedudukan dan peranan korban kejahatan dalam peristiwa kejahatan dalam hukum dan dalam masyarakat (Hal. 29). Dalam viktimologi, korban perkosaan dipandang sebagai korban yang tidak hanya menderita secara fisik, namun juga mengalami penderitaan psikologis.

Pollard (1992) mengatakan bahwa korban perkosaan tidak hanya mengalami penderitaan karena perkosaan itu sendiri namun juga dari orang-orang di lingkungan

sekitarnya yang menganggap mereka ikut bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada mereka (Stahl, Tomas., Daniel Eek, & Ali Kazemi, 2010, Hal. 240). Ketika perempuan menjadi korban perkosaan, ia juga akan mendapatkan reaksi sosial dari lingkungan sekitarnya. Barkas (1978) juga menjelaskan bahwa korban perkosaan langsung menyalahkan diri mereka sesaat setelah perkosaan terjadi. Tidak itu saja, korban juga dipersalahkan oleh orang-orang di sekitarnya. Tidak hanya di lingkungan sekitarnya, terkadang korban kejahatan perkosaan ini malah mendapatkan viktimisasi oleh para penegak hukum yang menanganinya atau bahkan mengalami diskriminasi gender dalam prosesnya.

Selanjutnya, Campbell (1999) mengemukakan bahwa korban perkosaan rentan mengalami viktimisasi sekunder. Viktimisasi sekunder ini dapat terjadi ketika korban berhadapan dengan proses hukumnya, termasuk dengan penegak hukum, proses medis, dan sistem perawatan kesehatan mental (p. 702). Merujuk pada apa yang telah dikemukakan oleh Campbell, maka dapat dikatakan bahwa perempuan korban perkosaan cenderung mengalami viktimisasi sekunder ketika mengadukan peristiwa perkosaan yang telah dialaminya kepada aparat sistem peradilan pidana.

Selain mengalami viktimisasi sekunder, perempuan korban perkosaan juga telah dilanggar hak-haknya sebagai perempuan dan sebagai korban itu sendiri. Niken Savitri (2008) mengemukakan bahwa perempuan merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang juga harus dilindungi hak asasinya, sehingga pelanggaran terhadap hak asasi perempuan harus juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia secara umum (Hal. 2).

Dalam kriminologi, penanganan perempuan korban perkosaan adalah bentuk reaksi formal yang dilakukan oleh

sistem peradilan pidana. Mustofa (2007) mengatakan kriminologi mempelajari reaksi formal terhadap kejahatan yang terwujud dalam terbentuknya hukum pidana dan sistem peradilan pidana tersebut adalah suatu analisa sosiologis yang kritis terhadap proses pembuatan hukum (pidana), substansi dari hukum, dan efektivitas pelaksanaannya (Hal. 45).

Dalam kepolisian Indonesia, terdapat beberapa unit kerja yang terlibat dalam penanganan kasus kejahatan seksual. Unit - unit kerja tersebut adalah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), Kasat IV Renakta (Kekerasan Anak dan Wanita) Polda Metro Jaya, serta unit identifikasi Pusat *Indonesia Automatic Fingerprint Identification System* (PUSINAFIS) di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dan *Indonesia Automatic Fingerprint Identification System* (INAFIS) di Kepolisian Daerah (Polda) maupun Kepolisian Resor (Polres).

Pusat *Indonesia Automatic Fingerprint Identification System Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia* (PUSINAFIS Bareskrim Polri) merupakan unsur dari Kepolisian Republik Indonesia. PUSINAFIS Bareskrim Polri memiliki fungsi mendukung proses penegakan hukum dan pelayanan masyarakat. Dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum, maka PUSINAFIS Bareskrim Polri melakukan identifikasi yang berlandaskan *scientific investigation*.

Dalam sistem peradilan pidana, petunjuk teknis (juknis) merupakan acuan bagi para aparaturnya dalam bertindak. Petunjuk teknis merupakan pedoman tertulis yang harus diikuti. Petunjuk teknis adalah sebutan lain dari *Standard Operating Procedure* (SOP). *The U.S. Environmental Protection* (EPA) Agency mendefinisikan SOP sebagai satu set instruksi tertulis mengenai kegiatan rutin atau berulang yang

diikuti oleh organisasi. Pengembangan dan penggunaan SOP merupakan bagian integral dari sistem mutu yang sukses agar individu dalam organisasi tersebut dapat melakukan pekerjaan dengan benar.

Dalam sistem peradilan pidana, khususnya kepolisian, maka istilah yang sering digunakan adalah petunjuk teknis. Dalam penanganan perempuan korban perkosaan yang dilakukan oleh sistem peradilan pidana, yang dalam hal ini adalah polisi, maka dibuatlah petunjuk teknis - petunjuk teknis, Sehingga dalam pelaksanaan tugasnya sebagai petugas identifikasi, aparatur di PUSINAFIS Bareskrim Polri berpedoman kepada juknis.

Ketika berbicara mengenai juknis, serta merta kita melihat bagaimana isi juknis tersebut. Terkait dengan isu sensitivitas gender, maka kita tidak bisa mengesampingkan apakah di dalamnya telah terkandung sensitivitas terhadap pengalaman dan situasi khusus yang dialami perempuan korban kejahatan seksual khususnya perkosaan.

Dampak perkosaan sudah berat dan dapat dikatakan bahwa perkosaan sendiri merupakan suatu teror, maka korban jangan sampai mengalami viktimisasi sekunder. Jika dari proses identifikasi yang dilakukan oleh PUSINAFIS Bareskrim Polri, yang dalam hal ini petugasnya mengacu berdasarkan petunjuk teknis (juknis) terhadap kasus perkosaan perempuan tidak memiliki sensitivitas gender, maka dalam penanganannya perempuan korban perkosaan rentan mengalami trauma berkepanjangan dan viktimisasi sekunder serta ketika menjalani proses selanjutnya dalam sistem peradilan pidana, perempuan korban perkosaan akan terus merasa trauma.

Peneliti menggunakan kerangka pemikiran dalam penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran ini bertujuan untuk

mempelajari berbagai konsep dan literatur serta studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara menelusuri, mengumpulkan, dan memahami literatur seperti jurnal, artikel, dan instrumen hukum yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas. Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran disusun dalam bagian - bagian, yaitu: 1) perkosaan merupakan bentuk dominasi laki - laki terhadap perempuan; 2) perempuan korban perkosaan di dalam hukum dan sistem peradilan pidana. Penyusunan ini dimaksudkan agar pembaca dapat memahami alur pemikiran peneliti dalam memahami permasalahan yang diangkat.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang sensitivitas gender dalam Petunjuk Teknis identifikasi penanganan perempuan korban perkosaan di Pusat *Indonesia Automatic Fingerprint Identification System* Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (PUSINAFIS Bareskrim Polri) serta implementasinya dan bagaimana pemahaman sensitivitas gender petugas identifikasi kepolisian dalam penanganan perempuan korban perkosaan.

Perkosaan Merupakan Bentuk Dominasi Laki - Laki terhadap Perempuan

Ketika perempuan menjadi korban perkosaan, ia tidak saja harus bertahan dari kekerasan seksual yang telah di alaminya, tapi juga stigma dari orang - orang di sekitarnya. Seperti yang disampaikan oleh Pollard (1992), bahwa korban perkosaan harus bertahan dari anggapan orang - orang di sekitarnya yang melihat korban juga bertanggung jawab atas apa yang menimpa mereka (Stahl et al, 2010, Hal. 239 - 240).).

Senada yang disampaikan oleh Rosemarie Tong (1984) bahwa tidak hanya polisi, jaksa, dan hakim, tapi keluarga,

teman, psikiater, dokter, bahkan perawat, yang memperlakukan korban perkosaan tanpa perasaan dan kejam. Ketika perempuan menjadi korban perkosaan, dan ketika ia harus berhadapan dengan proses sistem peradilan pidana, korban masih memiliki resiko untuk mengalami viktimisasi sekunder . Viktimisasi sekunder ini kemudian turut memperparah rasa traumatik korban dan menurut *Handbook on Justice for Victim* yang dibuat oleh *United Nation Office for Drug Control and Crime Prevention*, viktimisasi sekunder yang melembaga terlihat jelas dalam sistem peradilan pidana.

Barnet (1997) menjelaskan bahwa dalam pandangan *feminist legal theory*, hukum dipandang sebagai produk patriarki, hukum dibuat oleh laki - laki dan untuk laki - laki, sehingga ketika perempuan menjadi korban dalam proses hukumnya terdapat bias gender yang tercermin dalam putusan hukum, misalnya. Lebih jauh dijelaskan oleh Barnet, dalam persidangan, misalnya, ketika laki - laki menjadi pelaku, maka pertanyaan yang diajukan kepada korban adalah pertanyaan mengenai gaya hidup dan *personality* korban itu sendiri, pertanyaan yang mengasumsikan pelaku laki - laki tidak bersalah.

Selanjutnya McLean (1988) dalam Barnet (1997) mengemukakan bahwa dalam menentukan validitas kesaksian korban perkosaan, polisi terkadang memberikan pertanyaan yang malah terkesan menyudutkan dan menyalahkan korban. Korban dilihat sebagai pihak yang pasif dan menginginkan terjadinya perkosaan. McLean juga mengatakan bahwa mitos - mitos perkosaan turut mempengaruhi proses hukum dalam kasus perkosaan. Mitos - mitos perkosaan seperti misalnya perempuan digambarkan sebagai penggoda secara seksual sehingga menyebabkan laki - laki tidak bisa mengendalikan dirinya,

memengaruhi proses hukum dalam kasus perkosaan itu sendiri. Sehingga asumsinya adalah perempuan dapat benar - benar dikatakan telah mengalami perkosaan apabila mereka dapat membuktikan ketidakbersalahan mereka dari “*sexual teases*” yang “dituduhkan” kepada mereka.

Perempuan Korban Perkosaan di Dalam Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Perkosaan menimbulkan efek traumatik terhadap korban. Penelitian sebelumnya (Bard dan Ellison, 1974; Burgess dan Holmstrom, 1974; Fox dan Scherl, 1972; Queen's Bench Foundation, 1975; Ruch dan Chandler, 1979) menunjukkan bahwa perkosaan dan bentuk kekerasan seksual lainnya memiliki dampak traumatik dan seringkali dampak tersebut bertahan lama terhadap korban (Ruch et al, 1980, Hal. 248). Lebih jauh Ruch et al (1980) mengatakan bahwa trauma perkosaan ini berdampak pada tingkat perubahan hidup sebelumnya dan status emosional dari korban itu sendiri. Tjaden dan Thoennes (2006) dan U.S Department of Justice (2002) juga menunjukkan fakta bahwa 1 dari 3 perempuan korban perkosaan mengalami trauma pasca perkosaan dan masalah lainnya, seperti rasa cemas dan gelisah, (Rich dan Seffrin, 2012, Hal. 265).

Selain itu, perempuan korban perkosaan rentan mengalami viktimisasi sekunder. Berdasarkan *Handbook on Justice for Victim* yang dibuat oleh *United Nation Office for Drug Control and Crime Prevention*, viktimisasi sekunder mengacu pada viktimisasi yang terjadi bukan karena akibat langsung tindakan kriminal itu sendiri melainkan dari respon lembaga maupun individual terhadap korban. Orth (2002) dan Campbell (2005) mengatakan bahwa viktimisasi sekunder juga diartikan sebagai sikap menyalahkan korban, reaksi - reaksi,

tingkah laku - tingkah laku dan praktik-praktik yang dilakukan oleh penyedia layanan yang menyebabkan pelanggaran terhadap hak-hak korban dan/atau malah memberikan trauma tambahan terhadap korban (Wolhuter et al, 2009, Hal. 55).

Viktimisasi sekunder yang melembaga ini terlihat jelas dalam sistem peradilan pidana. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ketika korban perkosaan melaporkan kejadian yang mereka alami (perkosaan) kepada polisi, yang merupakan gerbang pertama dari sistem peradilan pidana, rentan mengalami viktimisasi sekunder. Terjadinya viktimisasi sekunder mengindikasikan bahwa hukum tidak berpihak kepada perempuan yang menjadi korban perkosaan.

Salah satu tindakan yang paling sering dilakukan oleh polisi terhadap korban perkosaan adalah menyalahkan mereka. Gibbs (1991) mengemukakan bahwa konsep menyalahkankorbaninimemilikipandangan bahwa korban perkosaan itu berbeda dari perempuan lainnya, baik dari sikap maupun tindakannya. Menurut pandangan konsep menyalahkan korban ini, ada beberapa jenis perempuan yang “mencari masalah” dan akhirnya “mendapatkan diri mereka diperkosa” (Karmen, 2010, Hal. 264).

Karmen (2010) juga menjelaskan bahwa di berkas kasus perkosaan, sering terdapat *statement-statement* dari pelaku, saksi atau penyidik yang menyudutkan bahkan menyalahkan korban. Dalam hal ini, menurut polisi, korban turut bertanggung jawab atas tindakan yang dialaminya. Hal tersebut terjadi karena adanya mitos-mitos perkosaan yang telah diterima oleh polisi dan mempengaruhi sudut pandang mereka terhadap perempuan korban perkosaan. Sikap menyalahkan korban yang dilakukan oleh polisi kemudian menjadi alasan korban untuk tidak melaporkan perkosaan yang terjadi kepada polisi. Koss (1992) menyatakan dengan tidak melaporkan ke

polisi, korban berusaha untuk menghindari penanganan yang bias oleh polisi dan ketidaknyamanan yang dibawa karena mengalami viktimisasi sekunder (Areh et al, 2009, Hal. 86). Penelitian yang dilakukan oleh Areh et al (2002) menunjukkan bahwa polisi lebih banyak menyalahkan korban ketika ia diperkosa oleh suaminya.

Selain menyalahkan korban, yang sering terjadi pada perempuan korban perkosaan adalah dipojokkan oleh pertanyaan-pertanyaan yang mempertanyakan tentang *consent* atau persetujuan korban pada saat perkosaan. *Consent* atau persetujuan adalah hal utama dalam perkosaan. Seperti yang dikatakan Carol Smart (1989) dalam bukunya yang berjudul *Feminism and the Power of Law*, bahwa *consent* adalah inti dari perkosaan. Namun, seringkali pada saat melakukan penyidikan terhadap tersangka, penyidik sering melontarkan pertanyaan yang menuntun bahwa korban juga ikut menikmati hubungan seksual yang dipaksakan tersebut, sehingga yang namanya *consent* ini menjadi tidak jelas pada kasus perkosaan. Padahal, para korban, termasuk korban perkosaan memiliki hak-hak korban yang harus dipenuhi oleh aparat sistem peradilan pidana.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif (Creswell; 2007) sendiri merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan kualitatif, lebih lanjut, mementingkan pada proses dibandingkan dengan hasil akhir.

Peneliti menggunakan metode penelitian

ini karena peneliti ingin mengeksplorasi petunjuk teknis identifikasi yang ada di PUSINAFIS Bareskrim Polri dan ingin mengetahui apakah petunjuk teknis tersebut memiliki sensitivitas gender atau tidak.

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan Creswell (2007) bahwa penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

Metode kualitatif menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga dapat dikatakan bahwa metode kualitatif itu sendiri berkembang secara dinamis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan perspektif feminis. Reinharz (1992) mengatakan perspektif feminis tidak dengan sinis menaruh perempuan dalam penelitian dan kegiatan ilmiah mereka untuk semata menghilangkan kesan seksis. Bagi perspektif feminis, kehidupan seorang perempuan merupakan sesuatu yang berharga.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a) Studi dokumen

Data didapatkan dari PUSINAFIS Bareskrim Polri berupa petunjuk teknis yang akan dikaji oleh peneliti, hasil wawancara baik dengan petugas polisi di PUSINAFIS Bareskrim Polri dan bidang identifikasi Polres Bekasi Kabupaten. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan data-data dari bahan dokumentasi, tulisan ilmiah maupun dari berbagai sumber tulisan lainnya.

b) Wawancara

Selain itu dalam penelitian ini juga dilakukan wawancara/*interviewing*. Susan Stainback dalam Sugiyono (2006) mengemukakan bahwa : *interviewing provide the researcher a means to gain a deeper understanding of how the participant*

interpret a situation of phenomenon that can be gainet through observation.

(Terjemahan bebas : wawancara memberikan peneliti pemahaman yang mendalam tentang bagaimana partisipan menginterpretasikan suatu fenomena yang dapat diperoleh melalui observasi)

Dalam penelitian ini, sumber yang akan diwawancarai adalah petugas identifikasi PUSINAFIS Bareskrim Polri. Wawancara dilakukan untuk mengetahui seperti apa proses pembuatan petunjuk teknis, kultur dan suasana kerja di sana serta seperti apa pemahaman petugas terhadap isu sensitivitas gender dalam petunjuk teknis penanganan perempuan korban perkosaan dan pemahaman sensitivitas gender petugas itu sendiri.

Kemudian untuk mengetahui bagaimana implementasi dari petunjuk teknis (juknis) tersebut, maka peneliti akan melakukan wawancara terhadap petugas polisi bidang identifikasi di Polres Bekasi Kabupaten. Kemudian peneliti juga melakukan wawancara untuk mengetahui kultur dan suasana kerja di sana serta seperti apa pemahaman sensitivitas gender petugas itu sendiri.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis wacana yang dikembangkan oleh van Dijk. Menurut van Dijk, penelitian atas wacana tidak cukup hanya didasarkan pada analisis atas teks semata, karena teks hanya hasil dari suatu produksi yang harus juga diamati. Di sini harus dilihat juga bagaimana suatu teks diproduksi sehingga kita memperoleh suatu pengetahuan kenapa teks bisa semacam itu (Eriyanto, 2005, Hal. 221). Model ini sering disebut juga “kognisi sosial”. Wacana oleh van Dijk digambarkan mempunyai tiga dimensi yakni teks, kognisi sosial dan konteks sosial. Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan dua dimensi yakni teks dan kognisi sosial dalam melakukan analisis.

Maksud dimensi kognisi sosial adalah bagaimana pemahaman dari pembuat teks petunjuk teknis itu sendiri.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan analisis terhadap juknis dengan menggunakan indikator-indikator sensitivitas gender yang telah dirumuskan berdasarkan pada hasil kajian literatur dan konsep-konsep. Namun tidak sampai di situ saja, peneliti kemudian mencari tahu bagaimana teks juknis tersebut dirumuskan dan hal-hal lainnya yang berkaitan seperti kultur dan suasana kerja serta bagaimana pemahaman sensitivitas gender petugas identifikasi kepolisiannya. Untuk mengetahui hal tersebut, maka peneliti menggunakan metode wawancara, baik di PUSINAFIS Bareskrim Polri maupun di Polres Bekasi Kabupaten.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam melakukan analisis terhadap juknis penanganan perempuan korban perkosaan, maka peneliti membuat indikator-indikator sensitivitas gender. Dari indikator-indikator yang dibuat oleh peneliti (tabel terlampir), semua juknis di bidang identifikasi, yang mengenai daktiloskopi dan fotografi kepolisian dapat dikatakan tidak memiliki sensitivitas gender di dalamnya.

Salah satu yang paling fatal adalah juknis NO.POL. : JUKNIS/10/III/2000 tentang Pemotretan Luar Studio poin 9d. Dalam poin tersebut dijabarkan teknis melakukan fotografi kepolisian untuk kasus perkosaan. Dalam penjabarannya itu dikatakan bahwa pemotretan terhadap bukti-bukti perkosaan dilakukan secara close up. Dalam poin juknis tersebut, tidak ada sama sekali satu kata pun yang memenuhi indikator-indikator sensitivitas gender. Hal ini bisa diartikan bahwa dengan isi juknis yang seperti ini, korban perkosaan sama saja mengalami ‘perkosaan kedua’. Seperti yang disampaikan oleh Rebecca Campbell (2008), bahwa banyak korban perkosaan yang kemudian

mencari bantuan pasca perkosaan, baik dari sistem hukum, medis dan kesehatan mental, mengalami 'perkosaan kedua'. Maksud dari 'perkosaan kedua' adalah mereka mengalami viktimisasi sekunder yang dilakukan oleh aparaturnya dalam sistem peradilan pidana yang dalam hal ini direpresentasikan oleh juknis penanganan perempuan korban perkosaan di bidang identifikasi.

Selanjutnya, di juknis NO.POL. : JUKNIS/06/III/2000 tentang Pengambilan Sidik Jari yang Baik dan juknis NO.POL. : JUKNIS/04/III/2000 tentang Pengembangan Sidik Jari Laten Pada Kulit Manusia peneliti tidak menemukan adanya isu pemenuhan hak asasi manusia maupun hak korban, terutama pada saat menangani kasus perkosaan. Pada saat pengambilan sidik jari, misalnya, di juknis tersebut hanya berbunyi agar petugas memegang tangan yang akan diambil sidik jarinya, meminta untuk berdiri di dekat petugas. Di juknis tersebut hanya tertera hal-hal yang bersifat umum saja. Tidak ada teks khusus yang menyatakan bagaimana seharusnya petugas mengambil sidik jari korban, khususnya bila korban adalah perempuan. Padahal, dalam kaitannya dengan perempuan yang menjadi korban, penanganannya benar-benar harus memperhatikan kebutuhan sang perempuan korban itu sendiri, apalagi pada kasus perkosaan. Hal ini dikarenakan perkosaan itu sendiri akan menimbulkan efek traumatik pada korban. Ini seperti apa yang disampaikan oleh Ruch et al (1980) dalam Rich dan Seffrin (2012) bahwa perkosaan dan bentuk kekerasan seksual lainnya memiliki dampak traumatik dan seringkali dampak tersebut bertahan lama terhadap korban. Bayangkan ketika petugas mengambil sidik jari perempuan korban perkosaan dengan tata cara yang tertuang di dalam juknis tersebut. Tentu saja bila tata caranya demikian bisa menambah rasa traumatik pada perempuan

yang menjadi korban perkosaan. Padahal, dalam *Compendium of United Nations Standards and Norms in Crime Prevention and Criminal Justice* (2006), pada bagian ketiga dijelaskan pula tentang bagaimana standar dan norma-norma terkait dengan pencegahan kejahatan dan masalah korban, terutama anak-anak dan perempuan korban kekerasan, namun hal ini tidak tercantum di dalam juknis-juknis tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa peneliti juga meneliti bagaimana implementasi juknis-juknis ini di lapangan, yang dalam hal ini di bidang identifikasi Polres Bekasi Kabupaten. Dari hasil penelitian, peneliti mendapatkan fakta bahwa terjadi 'pemangkasan fungsi' kerja bidang identifikasi di Polres Bekasi Kabupaten, terutama dalam menangani kasus perkosaan dan kejahatan seksual lainnya. Di Polres Bekasi Kabupaten, khususnya di bagian Identifikasi Reserse, apa yang tertuang di juknis dan bagaimana implementasinya berbeda.

Seperti yang dikatakan oleh WS, bahwa selama ini bagian identifikasi di tingkat polda, polres maupun polsek, untuk kasus perkosaan, hanya melakukan fungsinya di bidang fotografi kepolisian, yakni olah TKP saja. Fungsi pemotretan korban, luka-luka pada korban, selama ini tidak dilakukan. Hal ini dikarenakan adanya unit PPA yang melakukan pemeriksaan dan penanganan pada korban sehingga fungsi identifikasi sendiri sepenuhnya menjadi tidak dilakukan (SOP terlampir). Sedangkan pengambilan sidik jari pada korban hanya jika korban meninggal dunia dan itupun jika diminta oleh penyidik kasus yang bersangkutan.

Lalu, apa yang dimaksud dengan 'pemangkasan fungsi' ? maksud dari 'pemangkasan fungsi' adalah bahwa ternyata pada pelaksanaan penanganan untuk kasus perkosaan dan kejahatan seksual lainnya, identifikasi yang dilakukan oleh petugas

polisi bidang identifikasi di Polres Bekasi Kabupaten hanya melakukan olah TKP dan fotografi kepolisian hanya pada pemotretan TKP dan barang bukti yang ada di TKP. Fungsi pengambilan sidik jari pada korban, pemotretan korban, pemotretan barang bukti yang ada di korban seperti luka, misalnya, tidak dilakukan. WS, informan dari Polres Bekasi Kabupaten menambahkan bahwa di tingkat Polisi Daerah (Polda), Polisi Resor (Polres), maupun Polisi Sektor (Polsek) juga melakukan fungsi yang sama. Mengalami 'pemangkasan fungsi' juga. Hal ini bisa terjadi karena di Polres Bekasi Kabupaten ada SOP (Standar Operasional Prosedur) tentang Mekanisme Penerimaan Laporan/Pengaduan Penanganan Perkara Terkait Perempuan dan Anak (terlampir).

Dalam SOP tersebut dijabarkan bahwa setiap ada kasus yang terkait perempuan dan anak, termasuk di dalamnya kasus perkosaan, maka penanganannya dilakukan oleh unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Walaupun dalam SOP tersebut tidak dijabarkan secara gamblang penanganan yang berkaitan dengan identifikasi korban, namun menurut informan, tetap saja fungsi bidang identifikasi di Polres Bekasi Kabupaten hanya pada olah TKP dan pemotretan barang bukti yang ada di TKP saja. Sisa fungsi kerja yang lain menurut informan dilakukan oleh unit PPA. Peneliti berpendapat bahwa seharusnya tidak boleh ada ketimpangan antara juknis di bidang identifikasi dengan SOP tersebut. Namun untuk mengetahui lebih dalam hal tersebut tentu saja harus dilakukan penelitian lagi yang memang berkonsentrasi pada isu tersebut.

Oleh informan, peneliti ditunjukkan contoh berita acara penanganan kasus perkosaan yang dilakukan oleh bidang identifikasi, namun sayangnya peneliti tidak boleh mendokumentasikan berkas berita acara tersebut karena sifatnya yang rahasia.

Memang dalam berkas berita acara tersebut peneliti melihat bahwa fungsi kerja yang dilakukan oleh bidang identifikasi di sana hanya olah TKP dan pemotretan barang bukti yang ada di TKP saja. Maka dari hasil tersebut, peneliti tidak dapat melakukan wawancara terhadap korban perkosaan yang kasusnya ditangani oleh bidang identifikasi di Polres Bekasi Kabupaten karena memang tidak ada penanganan langsung terhadap korban yang dilakukan oleh tim identifikasi.

Menurut peneliti, seharusnya biarkan saja bidang identifikasi bekerja sesuai dengan fungsinya namun dengan catatan bahwa yang melaksanakan tugasnya dalam berhadapan langsung terhadap korban perkosaan haruslah petugas polisi perempuan yang berperspektif gender, memiliki sensitivitas gender. Jika memang tidak ada petugas polisi perempuannya, maka petugas polisi laki-laknya benar-benar harus memiliki sikap profesionalisme tinggi, empati, sensitivitas gender serta pemahaman gender yang benar-benar baik dan tentu saja harus ada pendamping korban yang mendampingi pada saat penanganan. Seperti yang dikatakan oleh Jordan (2002) bahwa yang memengaruhi tingkat kenyamanan dan kepuasan korban perkosaan dalam penanganannya adalah profesionalisme, kehangatan dan sensitivitas petugas polisi, baik petugas laki-laki maupun perempuan.

Mengapa demikian? Hal ini karena identifikasi pada TKP dan korban merupakan kegiatan awal dalam penyidikan yang berperan penting dalam rangka mengungkap kasus tersebut. Selain itu, sebenarnya tidak masalah jika unit seperti identifikasi menangani kasus perkosaan dalam hal identifikasi kepolisian tentunya. Hal ini berdasarkan pada standar-standar maupun guidelines yang dikeluarkan oleh badan-badan internasional seperti *International Police Standard: The European Code of*

Police (2001), *United Nation Criminal Justice Standards for United Nation Police* (2009), dan *Compendium of United Nations Standards and Norms in Crime Prevention and Criminal Justice* (2006).

Dalam standar-standar dan *guidelines* tersebut dijabarkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, polisi dan pejabat penegak hukum lainnya harus menghormati dan melindungi martabat manusia dan menjunjung tinggi hak-haknya, serta mereka harus sensitif dan memahami sesuai kebutuhan khusus pada masing-masing korban/pelaku, misalnya anak-anak, perempuan, dan kaum minoritas sehingga peneliti berpendapat bahwa semua unit di kepolisian yang berfungsi menangani kasus kejahatan bisa berhadapan dengan korban, khususnya perempuan korban perkosaan, karena mereka memang dituntut untuk memiliki rasa simpati, empati, dan termasuk rasa sensitivitas gender yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya.

Selain melakukan analisis terhadap juknis-juknis di bidang identifikasi, khususnya dalam menangani perempuan korban perkosaan, peneliti juga melakukan wawancara terhadap para informan menyangkut pemahaman petugas identifikasi terhadap sensitivitas gender, serta mencari tahu bagaimana kultur dan suasana kerja di PUSINAFIS Bareskrim Polri serta Polres Bekasi Kabupaten.

Suasana di PUSINAFIS Bareskrim Polri dan Polres Bekasi Kabupaten memang bersifat kekeluargaan, hangat dan harmonis. Tapi peneliti juga menemukan fakta bahwa kultur di kedua tempat masih sangat patriarki. Dalam sesi wawancara, salah satu informan mengatakan bahwa yang melaksanakan tugas lapangan kebanyakan adalah petugas laki-laki. Sedangkan petugas perempuan, baik yang polisi maupun PNS nya, biasanya hanya dijadikan staf dan mengurus hal-hal yang berbau administrasi.

Di Polres Bekasi Kabupaten pun demikian. Dari 9 orang pegawai di bidang identifikasinya, 1 orang adalah petugas PNS perempuan dan ia bertugas untuk mengurus hal-hal yang bersifat administrasi saja. Peneliti menyimpulkan dengan kultur kerja yang masih bersifat patriarki di PUSINAFIS Bareskrim Polri dan Polres Bekasi Kabupaten, menunjukkan sebenarnya telah terjadi diskriminasi terhadap petugas perempuan yang bekerja di sana, baik yang polisi, maupun PNS nya.

Walaupun peneliti menemukan fakta bahwa beberapa informan kurang menyadari pentingnya sensitivitas gender di dalam suatu juknis, khususnya juknis penanganan korban perkosaan di bidang identifikasi kepolisian, namun para informan menyadari pentingnya pemahaman gender terhadap korban, khususnya korban perkosaan. Namun yang menarik dari penelitian ini bahwa kultur kerja yang patriarki memengaruhi sensitivitas gender di juknis penanganan perempuan korban perkosaan di bidang identifikasi kepolisian di PUSINAFIS Bareskrim Polri namun tidak memengaruhi pemahaman sensitivitas gender petugas baik di PUSINAFIS maupun di Polres Bekasi Kabupaten. Kemudian pendidikan sensitivitas gender tidak memengaruhi sensitivitas gender di juknis penanganan perempuan korban perkosaan di bidang identifikasi kepolisian di PUSINAFIS Bareskrim Polri namun memengaruhi pemahaman gender pada petugas baik di PUSINAFIS maupun di Polres Bekasi Kabupaten.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang diperoleh adalah :

- PUSINAFIS Bareskrim Polri tidak mau mengundang pihak di luar kepolisian yang ahli mengenai isu-isu

perempuan yang berhadapan dengan hukum, khususnya perempuan yang menjadi korban kejahatan untuk bersama-sama merumuskan atau merevisi juknis yang berkaitan dengan penanganan perempuan korban perkosaan.

- Petunjuk Teknis di bidang identifikasi kepolisian yang terkait dengan penanganan perempuan korban perkosaan dapat dikatakan tidak memiliki rasa sensitivitas gender dan dapat dikatakan dengan isi juknis tersebut, korban perkosaan mendapat “perkosaan kedua”.
- Di Polres Bekasi Kabupaten telah terjadi pemangkasan fungsi pada kegiatan identifikasi kepolisian, terutama dalam penanganan kasus perkosaan di mana hanya fungsi olah tempat kejadian perkara (TKP) dan pemotretan barang bukti di TKP yang berjalan.
- Bahwa pemahaman petugas identifikasi yang menjadi subjek penelitian sudah cukup baik. Walaupun mereka tidak secara langsung bersentuhan dengan perempuan korban perkosaan, namun mereka memahami bahwa dalam menangani perempuan yang menjadi korban kejahatan, khususnya korban perkosaan, maka penanganannya benar-benar harus memperhatikan hak asasi manusianya dan hak - hak sebagai korban.
- Ada dua faktor yang memengaruhi sensitivitas gender pada juknis dan praktiknya, yakni faktor kultur di tempat kerja dan faktor pendidikan sensitivitas gender, yang dijabarkan sebagai berikut :
 1. Faktor kultur di tempat kerja yang patriarki memengaruhi sensitivitas gender di juknis

penanganan perempuan korban perkosaan di bidang identifikasi kepolisian di PUSINAFIS Bareskrim Polri.

2. Faktor pendidikan sensitivitas gender tidak memengaruhi sensitivitas gender di juknis penanganan perempuan korban perkosaan di bidang identifikasi kepolisian di PUSINAFIS Bareskrim Polri.

3. Faktor kultur di tempat kerja yang patriarki tidak memengaruhi pemahaman sensitivitas gender pada petugas identifikasi kepolisian di PUSINAFIS Bareskrim Polri dan Polres Bekasi Kabupaten.

4. Faktor pendidikan sensitivitas gender memengaruhi pemahaman sensitivitas gender pada petugas identifikasi kepolisian di PUSINAFIS Bareskrim Polri dan Polres Bekasi Kabupaten.

- Dengan kultur yang masih bersifat patriarki, menyebabkan petugas perempuan mendapatkan “pelecehan kemampuan” dalam pembagian kerja.

Saran

Melihat kesimpulan dari analisis yang telah dibuat, maka berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat diberikan oleh peneliti:

- Pihak PUSINAFIS Bareskrim Polri perlu dan seharusnya mengundang pihak dari luar kepolisian yang memahami atau ahli tentang isu-isu perempuan, terutama perempuan yang menjadi korban perkosaan, pada saat merumuskan atau merevisi juknis-juknis identifikasi, khususnya yang berkaitan dengan penanganan perempuan korban perkosaan. Hal ini agar dalam teksnya nanti, benar-

benar terkandung rasa sensitivitas gender.

- Memperbanyak pelatihan-pelatihan tentang pentingnya sensitivitas gender terutama dalam menangani kasus-kasus kejahatan seksual yang menimpa perempuan. Tidak hanya di lingkungan PUSINAFIS Bareskrim Polri, tapi juga di unit-unit identifikasi di lingkup Polda, Polres, dan Polsek. Hal ini agar juknis dan implementasinya sejalan serta sebagai upaya untuk mencegah terjadinya viktimisasi sekunder terhadap perempuan-perempuan yang menjadi korban kejahatan seksual, termasuk yang menjadi korban perkosaan.
- Mengacu kepada standar dan guidelines internasional bagi petugas-petugas polisi dalam melaksanakan tugasnya yang harus selalu menjunjung tinggi pemenuhan hak asasi manusia, harkat dan martabat

manusia, ini menunjukkan bahwa unit identifikasi juga bisa melakukan fungsi identifikasi terhadap perempuan korban perkosaan. Fungsi yang 'dipangkas' karena adanya unit PPA bisa dilaksanakan oleh unit identifikasi. Tentu saja langkah yang harus dilakukan adalah melakukan koordinasi terhadap PPA mengenai fungsi unit identifikasi yang sebelumnya tidak dilakukan sehingga pada akhirnya ketika ada kasus perkosaan, unit identifikasi bisa melaksanakan semua fungsinya.

- Menambah jumlah personil perempuan di unit identifikasi dan memberi kesempatan untuk tugas di lapangan. Hal ini selain sebagai langkah penghapusan diskriminasi pembagian kerja pada perempuan juga pada saat penanganan perempuan korban perkosaan, petugas perempuan bisa turun langsung menangani korban.

Daftar Referensi

- Barkas, J.L. (1978). *Victims*. New York : Charles Scribner's Sons.
- Barnet, Hilaire. (1997). *Sourcebook on feminist jurisprudence*. London : Cavendish Publishing Limited.
- Campbell, Rebecca. (2008). *The Psychological Impact Of Rape Victim's Experiences With the Legal, Medical, and Mental Health System*. *American Psychologist*, 702-717.
- Jordan, Jan. (2002). *Will any Woman do? Police, Gender and Rape Victims*. Institution of Criminology, Victoria University of Wellington, Wellington, New Zealand, 319-344.
- Mustofa, M. (2007). *Kriminologi : Kajian Sosiologis terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*. FISIP UI PRESS.
- Rich, Karen., Patrick Seffrin. (2012). *Police interviews of sexual assaults reporters : Do attitudes matter?*. *Violence and Victims*, 27, 2, 263-279.
- Savitri, Niken. (2008). *Ham Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Stahl, Tomas., Daniel Eek, & Ali Kazemi. (2010). *Rape victim blaming as system justification : The role of gender and activation of complementary stereotypes*. *Soc Just Res*, 23, 239-258.
- Tong, Rosemarie. (1984). *Women, Sex, and the Law*. United State : Rowman & Allanheld.
- Wolhuter, Lorraine., Neil Olley, David Denham. (2009). *Victimology : Victimisation and Victims' Rights*. New York : Routledge-Cavendish.